



RINGKASAN KAJIAN

Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kebijakan yang Inklusif di Indonesia

Juni 2025

Indonesia memiliki masyarakat yang dinamis, dengan banyak organisasi yang secara aktif mengadvokasi

kepentingan kelompok rentan, mendorong perencanaan berbasis data, dan mengawal hadirnya kebijakan yang lebih inklusif. Meskipun umumnya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil (OMS) dan pemerintah masih belum optimal, bahkan sering kali bersifat simbolis. SKALA, program kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan memfasilitasi pelibatan jaringan OMS dalam proses kebijakan, memperkuat kapasitas jaringan OMS melalui penyediaan akses data penting, serta menyediakan alat pembelajaran untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan belanja yang lebih inklusif.

Untuk menilai tingkat kepercayaan antara jaringan OMS yang bergerak di isu GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dan aktor pemerintah di tingkat provinsi, Program SKALA bersama Bappenas dan SMERU Research Institute sebagai pelaksana penelitian, melaksanakan Confidence Survey (Survei Kepercayaan) di enam dari sepuluh provinsi mitra Program SKALA¹. Di setiap provinsi lima jaringan OMS yang fokus pada isu perempuan,

disabilitas, dan lansia dipilih melalui konsultasi dengan Program SKALA dan mitra pembangunan lainnya, seperti INKLUSI. Organisasi-organisasi ini



Markus Ipan, seorang petani dari Suku Dayak Bulusu, sedang bersiap-siap untuk berangkat ke ladangnya di Desa Bunau, Sekatak, Kalimantan Utara pada pertengahan Maret 2025 lalu.
(Foto: SKALA)

¹ Dua instrumen survei digunakan: (i) untuk mengukur tingkat kepercayaan dari perwakilan jaringan OMS GEDSI, dan (ii) untuk menilai tingkat kepercayaan pemerintah provinsi terhadap jaringan OMS GEDSI. Desain survei ini diadaptasi dari survei kepercayaan OECD, yang mengevaluasi kepercayaan terhadap pemerintah berdasarkan kriteria seperti responsivitas, keandalan, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, instrumen untuk jaringan OMS GEDSI juga mengukur tingkat kepuasan terhadap pengediaan layanan dasar serta pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah provinsi.



mewakili berbagai isu GEDSI dan masing-masing menyertakan tiga responden kunci, yakni direktur, sekretaris, dan anggota pengurus. Survei ini juga melibatkan tiga pejabat pemerintah dari lembaga yang memiliki interaksi langsung dengan jaringan OMS GEDSI.

Pendekatan metode campuran (mixed methods) digunakan untuk menggali kekuatan internal jaringan OMS serta kualitas hubungan mereka dengan pemerintah dan jejaring lainnya. Survei ini menyoroti baik sistem informal berbasis kepercayaan maupun mekanisme partisipasi formal, melalui kombinasi wawancara, diskusi kelompok terarah, tinjauan pustaka, dan survei kuantitatif. Pendekatan ini membantu membangun gambaran yang lebih utuh mengenai faktor struktural dan relasional yang membentuk kepercayaan dan keyakinan antara jaringan OMS dan pemerintah.

Hasil Survei Kepercayaan menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam tingkat kepercayaan dan pola keterlibatan jaringan OMS dengan pemerintah daerah.

Di antara provinsi mitra Program SKALA, jaringan OMS di Aceh menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap pemerintah daerah, dengan skor tinggi pada aspek² Integritas (6,01), Responsivitas (6,33), dan Keterbukaan (6,6). NTB berada di posisi berikutnya, dengan jaringan OMS setempat memberikan penilaian tinggi terhadap aspek Keandalan (6,66) dan Responsivitas (6,24). Sementara itu, NTT dan Gorontalo mencatat tingkat kepercayaan yang sedang namun relatif stabil. Di sisi lain, jaringan OMS di Maluku menunjukkan tingkat kepercayaan terendah, dengan skor Integritas sebesar (3,64), serta skor yang rendah pada aspek Keterbukaan (4,61) dan Keadilan (4,29). Meskipun aspek Responsivitas dan Keandalan umumnya dinilai cukup baik di sebagian besar provinsi mitra Program SKALA, Keterbukaan dan Keadilan masih menjadi tantangan, terutama di Maluku dan Kalimantan Utara. Perbedaan yang signifikan antara tingginya tingkat kepercayaan di Aceh dan rendahnya tingkat kepercayaan di Maluku menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat transparansi, keadilan, dan pelibatan jaringan OMS dalam proses kebijakan publik.

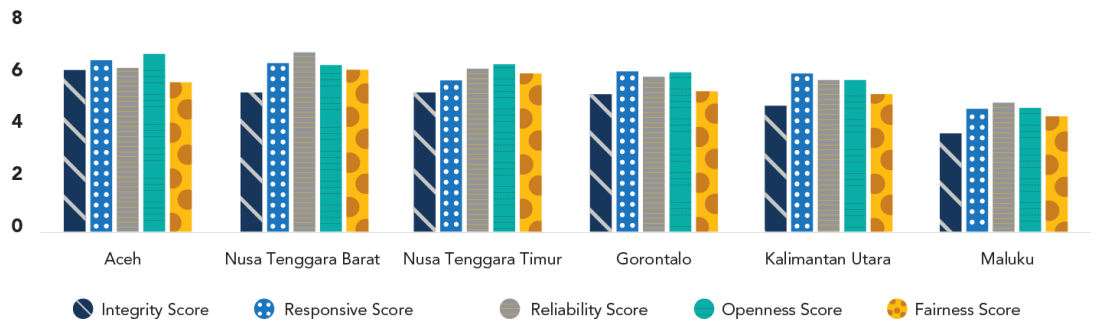
Gedung kantor Bupati Kupang
(Foto: SKALA)



Juni 2025

² Desain konseptual survei diadaptasi dari OECD Trust Survey, yang mengukur kepercayaan terhadap pemerintah berdasarkan beberapa aspek: Integritas, responsivitas, keterbukaan, keandalan dan keadilan. Integritas: Kepercayaan pada pejabat dalam mencegah korupsi dan melindungi komunitas rentan. Responsivitas: Ketanggapan pemerintah terhadap keluhan dan perubahan kebijakan diskriminatif. Keandalan: Keyakinan pada penanganan bencana, keluhan, dan perlindungan kelompok rentan. Keterbukaan dan Partisipasi: Akses data, dokumen publik, konsultasi, dan forum kelompok rentan. Keadilan: Prioritas bagi komunitas rentan dalam pemilihan program dan alokasi sumber daya

Gambar 1. Hasil Survei Kepercayaan Perwakilan jaringan OMS, Kajian Baseline GEDSI PROGRAM SKALA.



Organisasi Masyarakat Sipil menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong layanan dasar yang lebih inklusif. Survei Kepercayaan yang dilakukan Program SKALA mengidentifikasi lima isu utama yang perlu ditangani bersama untuk memperkuat peran jaringan OMS dalam mendukung agenda inklusi di tingkat daerah.

Pertama, keterbatasan pedoman di tingkat daerah menghambat jaringan OMS untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Meskipun pemerintah daerah mengakui pentingnya peran jaringan OMS dalam mengadvokasi isu-isu GEDSI, keterlibatan mereka sering kali hanya bersifat konsultatif dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang konkret. Untuk menjawab tantangan ini, Program SKALA bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman nasional perencanaan partisipatif.

Pedoman ini akan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan menegakkan kebijakan yang memformalkan partisipasi jaringan OMS. Melalui dukungan fasilitasi keterlibatan jaringan OMS, Program SKALA telah membantu jaringan OMS lokal berkontribusi dalam lebih dari 30 proses perencanaan di tingkat subnasional, yang sekaligus memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan. Ke depan, pertukaran pengetahuan antarprovinsi dapat memperlihatkan praktik-praktik baik dalam pelibatan masyarakat sipil secara produktif. Selain itu, melalui program pendampingan, provinsi yang telah memiliki kerangka partisipasi jaringan OMS yang kuat juga dapat mendukung provinsi lain yang masih dalam tahap pengembangan. Penguatan regulasi di tingkat lokal akan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan peran jaringan OMS dalam merancang kebijakan dan memperkuat layanan dasar.

Kedua, keterbatasan akses informasi yang andal melemahkan kapasitas jaringan OMS dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang kredibel dan berbasis bukti. Kementerian yang bermitra dengan Program SKALA telah berupaya memastikan agar data terpilah yang relevan dengan kebijakan tersedia secara konsisten melalui portal data di tingkat provinsi. Dukungan juga diberikan untuk meningkatkan aksesibilitas portal data bagi pengguna dengan disabilitas penglihatan, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Kalimantan Utara.



Selain itu, kemitraan untuk memperkuat kapasitas jaringan OMS dalam memanfaatkan data untuk kepentingan advokasi menjadi elemen penting yang perlu didorong. Pelibatan perwakilan jaringan OMS dalam penyusunan policy brief yang menyampaikan rekomendasi berbasis data kepada para pemangku kebijakan juga terus difasilitasi. Ke depan, perluasan akses jaringan OMS terhadap data yang kredibel menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas advokasi. Di samping itu, pelatihan mengenai pengumpulan data dan penilaian dampak akan memperkuat kapasitas jaringan OMS tidak hanya dalam melakukan advokasi, tetapi juga dalam mendukung pemantauan terhadap penyediaan layanan dasar dan rekomendasi kebijakan.



Ketiga, kapasitas jaringan OMS yang belum memadai dalam memantau pelaksanaan dan dampak jangka panjang kebijakan menjadi tantangan, meskipun mereka aktif dalam kegiatan advokasi. Di provinsi dengan tingkat kepercayaan tinggi seperti NTT dan NTB, jaringan OMS telah berhasil mendorong kebijakan yang inklusif, seperti Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas. Namun, upaya ini sering kali berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tanpa diikuti pemantauan implementasi yang terstruktur.

Di Aceh dan Maluku, advokasi sering kali dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan atau dalam kerangka tematik tertentu. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena tidak ditopang oleh sistem pemantauan yang memadai. Sebagai contoh, Aceh telah memiliki Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, tetapi dampaknya belum dapat diukur secara jelas akibat lemahnya pengawasan. Hal serupa terjadi di Maluku, di mana advokasi terhadap isu kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak berjalan aktif, tetapi tindak lanjutnya terhambat oleh kendala logistik dan keterbatasan pendanaan.

Sementara itu, di Kalimantan Utara dan Gorontalo terbuka peluang untuk mengintegrasikan alat pemantauan sejak awal. Namun, kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam mewujudkan hal tersebut. Ke depan, dibutuhkan kerangka pemantauan di tingkat provinsi yang melibatkan masyarakat sipil dan selaras dengan sistem pemerintah, guna memastikan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, perlu



dibangun mekanisme pengawasan kolaboratif antara jaringan OMS, pemerintah daerah, dan lembaga independen, yang mampu merancang proses evaluasi kebijakan secara terstruktur dan mendorong perbaikan jangka panjang.

Keempat, keterbatasan kapasitas jaringan OMS untuk terlibat dalam proses formal penganggaran pemerintah. Banyak jaringan OMS fokus pada kegiatan advokasi, tetapi kesulitan menerjemahkan agenda prioritas mereka ke dalam rencana aksi yang teranggarkan dan sesuai dengan kerangka fiskal di tingkat daerah. Di NTT, beberapa jaringan OMS telah berhasil memengaruhi alokasi anggaran untuk kebijakan inklusi disabilitas. Namun, sebagian besar lainnya belum memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menyusun usulan anggaran yang selaras dengan struktur pembiayaan daerah. Maluku juga menunjukkan kemajuan dalam peningkatan indeks kesetaraan gender serta pelaksanaan program pencegahan kekerasan. Agar inisiatif-inisiatif ini berkelanjutan, kapasitas jaringan OMS perlu diperkuat agar mereka dapat terlibat aktif dalam proses negosiasi anggaran yang sistematis dan terstruktur. Ke depan, pelatihan dalam analisis anggaran dan penyusunan proposal akan membantu jaringan OMS dalam mendorong alokasi belanja publik yang sejalan dengan agenda advokasi mereka.

Kolaborasi yang terstruktur, serta adanya proses konsultasi formal antara jaringan OMS, Bappeda, dan dinas-dinas sektoral terkait, menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara advokasi dan perencanaan kebijakan di tingkat daerah.



(Foto: SKALA)

Kelima, koordinasi yang lemah antar jaringan OMS mengurangi dampak kolektif yang seharusnya dapat dihasilkan dari kebijakan maupun implementasinya. Revitalisasi jejaring masyarakat sipil dapat memperkuat kerja-kerja jaringan OMS dengan menyatukan suara mereka dalam forum-forum kebijakan. Dukungan teknis juga berperan penting dalam memperkuat dasar hukum forum konsultasi jaringan OMS dan memperluas representasi organisasi yang terlibat.

Di Maluku, Program SKALA mendukung proses revitalisasi forum jaringan OMS dengan melibatkan 19 organisasi yang berfokus pada isu disabilitas, sehingga suara mereka lebih terdengar dalam penyusunan kebijakan daerah. Sementara itu, di provinsi lain, kemajuan masih beragam, karena regulasi yang berlaku terkadang membatasi partisipasi jaringan OMS secara lebih luas dalam forum konsultasi. Ke depan, kemitraan multipihak, termasuk skema pendanaan bersama antara pemerintah dan jaringan OMS, dapat memperkuat keberlanjutan layanan dasar yang



berkualitas. Kolaborasi yang lebih erat antara jaringan OMS dan penyedia layanan di tingkat akar rumput—seperti puskesmas, sekolah, dan lembaga perlindungan anak—juga akan memperkuat dampak advokasi terhadap penyediaan layanan di wilayah setempat.

Pada akhirnya, agar jaringan OMS dapat berperan secara bermakna dalam tata kelola, dibutuhkan dukungan berupa kebijakan yang jelas, akses data yang lebih baik, serta kolaborasi yang erat dengan institusi pemerintah. Dengan alat, sumber daya, dan kerangka hukum yang tepat, jaringan OMS mampu mendorong perubahan yang berdampak, dan mendukung pemerintah dalam merancang serta menjalankan kebijakan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan jaringan jaringan OMS secara berkelanjutan, Program SKALA terus berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih partisipatif, representatif, dan akuntabel di Indonesia.



(Foto: SKALA)



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id

 communications@skala.or.id

Whatsapp Channel

